

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Skripsi



**Nama : Ilham Kurniawan
NIM : 22 2014 253**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DENGAN PENDEKATAN *GOOD GOVERNANCE* PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Ilham Kurniawan
NIM : 22 2014 253**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin
Nama : Ilham Kurniawan
Nim : 22 2014 253
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada tanggal,

Pembimbing I

(Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II

(Nina Sabrina, S.E.,M.Si)
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Kurniawan

Nim : 22 2014 253

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2019
Yang membuat pernyataan,



Ilham Kurniawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Sukses cepat tercapai bila kita fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada hal yang kita takuti*
- *Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah*

Kupersembahkan kepada:

- *Apak dan Amak tercinta*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dapat bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Apak (Masrizal) Amak (Erlinawati) saudara-saudaraku, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi dan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari kedua orang tuaku. Serta penulis sampaikan ucapan terimakasih

kepada Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Dr.s H. Fauzi Ridwan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak.,CA Selaku Ketua program studi dan Ibu Nina Sabrina, S.E, M.Si, Selaku wakil program studi dan sekertaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nurul Hutami Ningsih S.E.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan dan Seluruh Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 2019

Penulis

Ilham Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Good Governance.....	12

2. Anggaran Pendapatan Daerah	19
3. Anggaran Belanja Daerah	22
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	23
B. Penelitian Sebelumnya	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasionalisasi Variabel	34
D. Data Yang Diperlukan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Umum DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin ..	39
2. Visi DPPKAD Kabupaten Banyuasin	40
3. Misi DPPKAD Kabupaten Banyuasin	41
4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan	90
2. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin	8
Tabel II.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	17
Tabel II.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	18
Tabel II.3 Pembahasan dan Perbedaan.....	31
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2013-2017	62
Tabel IV.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Belanja Daerah Kabupten Musi Banyuasin Periode 2013-2017.....	64
Tabel IV.3 Rincian Anggaran dan Realisai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2013-2017	64
Tabel IV.4 Biaya yang di Keluarkan Untuk Memperoleh Pendpatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2013-2017	66
Tabel IV.5 Anggaran dan Reaslisasi Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin periode 2013-2017	67
Tabel IV.6 Rincian Anggaran dan Realisai Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2013-2017	68
Tabel IV.7 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran Pendapatan Periode 2013-2017	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Lampiran 2	<i>Foto copy</i> sertifikat Toefl
Lampiran 3	<i>Foto copy</i> Sertifikat Hapalan AIK
Lampiran 4	<i>Foto copy</i> Aktifitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Lembaran Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran 6	Biodata Penulis

ABSTRAK

Ilham Kurniawan / 222014253/ 2019/ Analisis Anggaran Pendapatn Asli Daerah Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin/ Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagai mana Analisis Anggaran Pendapatan Asli Daerah Dengan Pendekatan *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis Anggaran Pendapatn Asli Daerah Dengan Pendekatan *Good Governance* Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan obeservasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* (*Participation , rule of low transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and efeectiviness*). Namun pada prinsip partisipasi, transparansi, efektif dan efisien, belum diterapkan secara optimal, ini dikarenakan APBD Kabupaten Musi Banyuasin belum optimal atas semua prinsip-prinsip good governance didalam menjalankan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga visi dan misi tidak tercapai

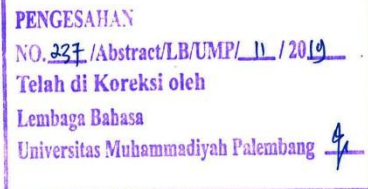
Kata kunci : Prinsip-prinsip *good governance*, APBD

Abstract

Ilham Kurniawan/222014253/2019/An Analysis of the Region Own source revenue with a Good Governance Approach at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kabupaten Musi Banyuasin/Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this research was to know how the analysis of the region own source revenue with good governance approach at the regional financial and asset management agency (BPKAD) of Kabupaten Musi Banyuasin. The purpose of this study was to find out the analysis of the region own source revenue with good governance approach at the regional financial and asset management agency (BPKAD) of Kabupaten Musi Banyuasin. The type of research used descriptive research. The data used primary data and secondary data. Data collection techniques were using observation and documentation. The data analysis method that would be used in this study was qualitative analysis. The results of the study showed that the principles of good governance (Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness). However, on the principle of participation, transparency, effectiveness and efficiency, it had not been implemented optimally, because the APBD of Kabupaten Musi Banyuasin had not been optimal for all the principles of good governance in carrying out tasks in regional financial management, so that the vision and mission were not achieved.

Keywords: Principles of good governance, APBD.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik di era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratis dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah, demokratisasi dalam berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya berlakukannya kedua undang-undang tersebut telah membuka era baru bagi pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah bertambah banyak. Bahwa dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan sebab yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah yang harus mengatur secara hati-hati terhadap pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*back bone*) penyelenggaraan pemerintah sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber, pengeluaran ukuran-ukuran standar dan evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan kordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan, Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan maafaat untuk masyarakat.

Perkembangan otonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh persiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintah yang bersih berwibawa atau yang dikena dengan istilah *Good Governance*. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *Good Governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Demi kepuasan kerja pada masyarakat pejabat publik atau yang lebih dikenal dengan pemerintah meningkatkan peningkatan pelayanan bagi publik.

Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan *Good Governance* diIndonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim *Good Governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan

BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan *Good governance* pun banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*.

Good Governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi pandang UNDP, *governance* dikatakan baik (*good*), apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat. Sementara *World Bank* memberikan pengertian tentang *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (K K N), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18)

Mardiasmo (2009: 25) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu penyelenggaraan

negara yang mengimplementasikan *Good Governance* berarti penyelenggaraan Negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Adapun penjelasan beberapa prinsip penyelenggaraan negara menurut Mardiasmo (2009:25) adalah sebagai berikut : Pertama, Partisipasi (*Keterlibatan*). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, kedua Pemerintahan berdasarkan hukum. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, ketiga Transparansi (*Kebebasan memperoleh informasi*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, keempat Responsivitas. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stake holder*, kelima Orientasi konsensus (*Kepentingan publik*). Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, keenam Keadilan. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan, ketujuh Efektifitas dan Efisiensi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Dalam kaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggung jawab, ada isu sentral yang mencuat ke permukaan yaitu isu *Good Governance*. *Good Governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penetapan *Good Governance*, dimana dengan menerapkan diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *Good Governance*. Karakteristik tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif bagi pelaku *Good Governance*.

APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih

banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu, sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya dan potensi daerah yang bersangkutan.

Pemberian hak otonomi daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tergantung dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2016: 25).

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku organisasi dinas daerah atau instansi pemerintah mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tugas BPKAD Kabupaten Musi Banyuasi tersebut tidak mudah karena penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BPKAD.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi cukup besar terutama sumber daya yang tersedia yaitu sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan energy. Dimana pemerintah Kabupaten Musi Banyuasi mengandalkan sektor

pertanian terutama perkebunan dalam mendorong perekonomiannya. salah satu sektor unggul dengan komoditas utama yang dikembangkan melalui perkebunan besar swasta yaitu : karet dan kelapa sawit, Sektor pertambangan juga berperan cukup besar dalam perekonomian baik komposisi dengan migas maupun non migas.

Berdasarkan data BPKAD tahun 2013-2017 secara keseluruhan terkait anggaran diduga masih belum menunjukkan adanya peningkatan realisasi terhadap target anggaran dalam pelaksanaannya dan mengalami fluktuasi atau tidak stabil nya anggaran pada setiap tahunnya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Banyuasin

TAHUN	REALISASI ANGGARAN PAD	REALISASI PAD	REALISASI BELANJA	EFEKTIVITAS %	EFESIENSI %
2013	120.736.252.822,11	112.649.472.589,98	2.938.283.773.342,00	104,6	88,8
2014	187.662.566.249,91	172.924.886.329,95	3.517.904.364.388,05	90,6	89,9
2015	209.791.141.320,85	181.795.444.466,14	2.096.431.426.307,00	81,1	80,5
2016	194.791.249.316,31	169.012.416.526,06	2.280.009.346.065,89	92,6	90,6
2017	226.673.797.781,00	209.410.035.753,13	2.340.644.994.246,46	91,8	91,1

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, 2019

Berdasarkan data pada tabel I.I. Menunjukkan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2017, begitu pula belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tahun 2014 belanja meningkat sebesar 3.517.904.364.388,05, peningkatan belanja ini dikarenakan Kabupaten Musi Banyuasin banyak melakukan pembelanjaan di sektor belanja operasi, belanja modal

dan belanja tak terduga, Kabupaten Musi Banyuasin jika dilihat dari efektivitas dan efisiensi masih belum efisien.

Plt Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) H Zabidi, melaporkan masalah keuangan yang ada di Kabupaten Muba, dimana dengan terpaksa beberapa waktu yang lalu membuat kebijakan menunda beberapa kegiatan untuk alokasi belanja langsung maupun tidak langsung sampai Keuangan Pemkab Muba membaik, Saya sangat mengapresiasi ada kepala daerah yang sudah pro-aktif datang guna memecahkan persoalan-persoalan yang ada di daerah termasuk masalah keuangan daerah, dan nantinya kami akan membuat kebijakan-kebijakan untuk mencari solusi masalah yang ada di Pemkab Muba. Jakarta, InfoPublik - (Beritamuba / Angga/toeb).

Plt Bupati Muba , David BJ Siregar, mengatakan bahwa, mungkin semua keinginan masyarakat belum terakomodir secara lengkap dalam APBD TA 2017. Hal ini dikarenakan adanya prioritas program-program pembangunan dan pembatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya, untuk itu ke depan kita semua harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bupati juga mengucapkan rasa bangga dan hormatnya pada seluruh anggota Dewan, berkat kerja keras dan kerjasama yang baik dalam waktu relatif singkat ini, telah merampungkan pembahasan penyusunan APBD TA 2017. Musi Banyuasin, *NewsHunter, Com-*

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun Anggaran 2019 telah resmi disepakati dalam Rapat Paripurna Persidangan III Rapat ke-28, Senin (5/11). Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin menjelaskan bahwa postur R-APBD itu diprioritaskan pada lima program, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan, produktivitas sektor daerah, produktivitas penjagaan lingkungan, dan stabilitas reformasi birokrasi, untuk masukan dan hal lainnya yang belum terpenuhi, akan kita maksimalkan pada 2019 ini demi kesejahteraan dan kontribusi positif terhadap masyarakat Muba. RMOL.CO.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Pendekatan *Good Governance* pada Badan Penglola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimanakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Pendekatan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Pendekatan *Good Governance* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk memahami Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Pendekatan *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin .

2. Bagi BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin .

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sifatnya sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Bobby Aldian Praja, dkk. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Good Governance* Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Kota Bandar Lampung.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/188>
- Efek Moderen *Good Governance* Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep. Nurmaini. 2 desember 2017.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3990>.
- Implementasi *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dddd Kota Bukittinggi. Sari Oktober 2015.
jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/download/15/10.
- Mahmudi.(2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: Penerbit UPPSTIMYKPN.
- Mahsun.(2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPPE.
- Natalia, dkk (2017) Penerapan *Good Governance* Dalam Penetapan APBD. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, juli 2017 : 310-316.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/4846/4573>.
- Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Murauke. 2 agustus 2016.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/1039>
- Pengaruh *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. M Rayidha Prasatya dkk. 2 november 2017.
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/a6d478aa11b6981ab0c8fce2de449494.pdf
- Silegar.(2015). *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sujarweni.(2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pusta Baru

Sugiono.(2017). *Metode Penelitian ADMINISTRASI*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, Alfabeta; Bandung

Zulkarnain.(2014). Implementasi *Good Governance* Terhadap Pendapatan Asli daerah . makalah ilmiah BISSOTEK, Vol.9,No. 1 april 2014: 47-56
http://jurnal.pnl.ac.id/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1416881862Zulkarnaini.pdf